
| | |
|-------------|---|
| Judul | : Komisi VII DPR Minta Menpar Widi tinjau kebijakan visa yang hambat wisman |
| Tanggal | : Jumat, 21 November 2025 |
| Surat Kabar | : Rakyat Merdeka |
| Halaman | : 4 |

Komisi VII DPR Minta Menpar Widi

Tinjau Kebijakan Visa Yang Hambat Wisman

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman). Indonesia dinilai tertinggal dibanding banyak negara ASEAN yang memberlakukan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.

Saat ini negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, hingga Myanmar telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing, termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.

Sebagai negara dengan potensi pariwisata terbesar di kawasan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya-Indonesia justru belum memaksimalkan peluang tersebut.

"Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kom-

petitif di ASEAN maupun global," kata Evita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Evita, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut. Semenanjung Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pascapandemi Covid-19. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab perkembangan wisman ke Indonesia tidak signifikan dibandingkan negara tetangga.

Evita mencatat kunjungan ke Malaysia pada delapan bulan pertama 2025 sudah 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025. Thailand meraih 24 juta pada sembilan bulan pertama 2025 dengan target 33,4 juta. Sementara Indonesia dalam sembilan bulan 2025 hanya mencapai 11,43 juta dari target 15 juta hingga akhir tahun.



Evita Nursanty

Bali memang ramai, tetapi jangan lupa secara nasional destinasi wisata kita belum mampu menarik lebih banyak wisman, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya. Ke Manado itu stagnan di 47 ribu, padahal kita pernah 130 ribu tahun 2019. Begitu juga Sumut yang belum banyak bergerak dari angka 240 ribu," katanya.

Menurut Evita, kebijakan bebas visa akan memberikan dampak ekonomi besar: meningkatkan kunjungan wisman secara drastis, mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan ekonomi kreatif.

tif; memperluas lapangan kerja; serta menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.

Komisi VII DPR menilai kebijakan visa Indonesia masih terlalu restriktif dan belum sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional. Namun mengenai durasi kunjungan serta negara mana yang diprioritaskan untuk bebas visa,

"Teknologi digital sekarang memungkinkan proses yang lebih mudah, pemeriksaan lebih cepat, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan keamanan tetap terjaga tanpa menghambat wisatawan, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data sebagaimana diterapkan negara lain," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana optimis devisa pariwisata 2025 dapat menembus target 18 miliar dolar AS, didukung capaian semester pertama sebesar 8,2 miliar dolar AS dan tren kunjungan wisatawan yang terus naik hingga akhir tahun. Momentum libur Natal dan Tahun Baru akan menjadi pendorong tambahan, sekaligus menunjukkan pemuliharaan pariwisata nasional yang semakin kuat.

Memasuki 2026, Kemenpar rencananya siapkan program lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pariwisata, mulai dari pengembangan wisata alam, peningkatan kompetensi pemandu, pendampingan destinasi berkelanjutan, hingga dukungan bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerintah juga melanjutkan program event nasional serta digitalisasi Tourism 5.0 untuk mempermudah perizinan acara. ■ PYB